

Research Article

Determinan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Sukri, Sukri^{1†}  Helly Suharlina²  Fara Dina³ 

¹Universitas Tanjungpura

*Correspondence author: b1011201037@student.untan.ac.id

Article Info: Received: ## Month ##### | Revised: ## Month ##### | Accepted: ## Month #####

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan data yang digunakan yaitu data panel dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2013-2022. Metode yang digunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (uji t, uji F dan koefisien determinasi) dengan bantuan E-views 10. Hasil uji t dalam penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kemudian uji F menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,299620 atau 29,96%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan jumlah penduduk dalam menjelaskan belanja daerah sebesar 29,96% sisanya dijelaskan oleh faktor atau variabel lainnya diluar penelitian ini.

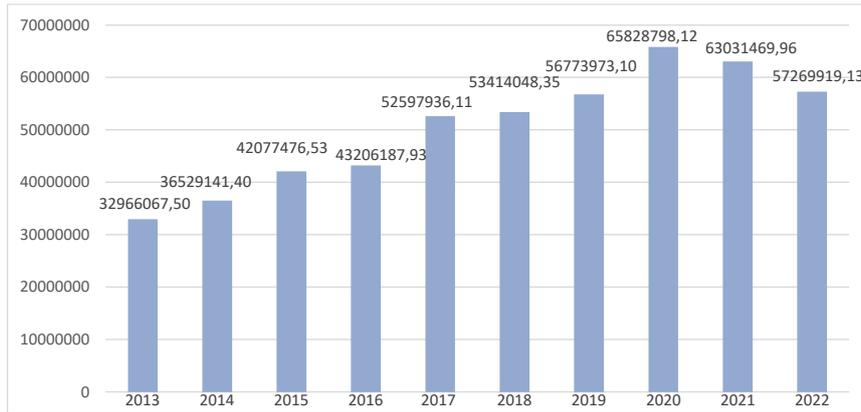
Keywords: Produk Domestik Regional Bruto; Jumlah Penduduk; Belanja Daerah.

1. Introduction

Indonesia adalah negara kesatuan, terdiri atas sejumlah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk peningkatan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada provinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola dan mengendalikan pemerintahannya sendiri. Adapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang dapat menghambat pertumbuhan stabilitas ekonomi. Selain pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, desentralisasi juga diperlukan untuk meningkatkan keikutsertaan warga dalam pemakaian sumber daya dengan efisien. Termasuk pada wewenang dari desentralisasi fiskal yaitu APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Deswanto et al. (2017) menjelaskan bahwa pemerintah akan mengubah fokus pada pembangunan perekonomian mulai membangun infrastruktur pada pengeluaran bagi kegiatan sosial misalnya program perawatan bagi orang tua (program posyandu lanjut usia) serta layanan kesehatan masyarakat. Pengeluaran-pengeluaran ini kemudian akan diwujudkan melalui anggaran daerah. Belanja daerah berisikan belanja langsung serta belanja tidak langsung. Pembelanjaan yang berkaitan langsung pada kegiatan atau agenda yang dilaksanakan dikenal sebagai belanja langsung. Pengeluaran ini umumnya berupa membeli barang ataupun jasa yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan atau program seperti pembelanjaan barang serta jasa, belanja modal serta belanja pegawai. Sementara itu belanja yang tidak berkaitan langsung pada kegiatan atau program yang dilaksanakan melainkan tetap diperlukan untuk mendukung kegiatan atau program tersebut disebutkan belanja tidak langsung. Pengeluaran ini umumnya termasuk ke dalam bentuk pembelian aset tetap atau pembayaran hutang dan bunga seperti belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bunga, belanja bagi hasil, belanja pegawai, bantuan sosial, serta pembelanjaan tidak diduga yang diambil untuk pembangunan infrastruktur.

Manfaat utama belanja daerah yaitu untuk membiayai dan meningkatkan pembangunan, mencakup aspek ekonomi, pelayanan umum, ketertiban, pertahanan, serta keamanan, perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan, kesehatan, perumahan serta pemukiman, pariwisata serta kebudayaan, agama, perlindungan sosial juga pendidikan. Pembangunan wilayah di pulau Kalimantan, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara masih dalam upaya pembangunan oleh pemerintah pusat dalam hal kesejahteraan maupun perekonomian daerahnya. Oleh karena itu pembangunan wilayah di pulau Kalimantan telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia di sejumlah periode sebelumnya. Ini dikarenakan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan faktor yang mendorong pencapaian belanja daerah yang efisien. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat yang terjadi salah satunya adalah masalah keterbatasannya anggaran yaitu terjadinya ketimpangan anggaran belanja daerah dan infrastruktur pada setiap daerah yang ada. Pada gambar 1 menunjukkan tingkat realisasi belanja pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 hingga pada 2022.



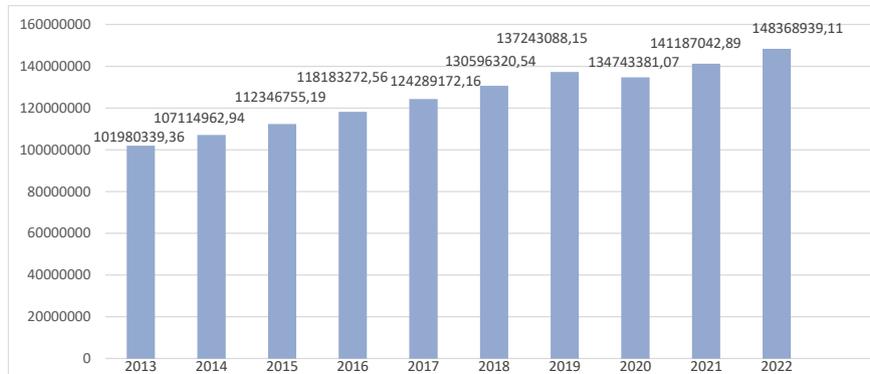
Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat, 2023, data diolah

Gambar 1 Realisasi Belanja Pemerintah di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Merujuk pada gambar 1 memperlihatkan perealisasi belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat periode 2013 hingga pada 2022 berfluktuasi tiap tahun, bisa terlihat di periode 2013-2020 jumlah realisasi belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan, tetapi di periode 2021-2022 mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan ketimpangan pada pengalokasian belanja pemerintah ke daerah sehingga pembangunan infrastruktur menjadi tidak merata. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membiayai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya dan diwajibkan untuk mengelola sumber pendapatan daerah secara efisien (Suharlina, 2018). Dimana dalam pengalokasian belanja pemerintah ke daerah ini semestinya dirasakan oleh seluruh masyarakat daerah baik pada tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa yang sulit untuk dijangkau juga turut merasakan pembangunan infrastruktur yang ada.

Tingginya tingkat realisasi belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Gorahe et al. (2018) makin besar Produk Domestik Regional Bruto sebuah wilayah, makin tinggi kapasitas pendapatan daerahnya dan meningkatnya pemasukan ini bisa dipergunakan dalam mendukung agenda pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, apabila PDRB mengalami kenaikan, belanja daerah juga akan meningkat. Itu tentu saja dapat memengaruhi pelaksanaan belanja daerah, karena PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada dasarnya mencerminkan pertumbuhan perekonomian sebuah wilayah yang positif. Wagner memaparkan mengenai belanja daerah bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi belanja pemerintah secara positif sehingga aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat. Dengan demikian akan mendorong pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat (Solikin, 2018). Namun, perlu diakui bahwa kesenjangan perekonomian diantara kawasan juga menjadi peristiwa yang tak dapat dihindari. Dimana perlu diketahui bahwa tingginya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada sebuah daerah belum tentu mengindikasikan adanya distribusi pendapatan yang merata di dalam daerah tersebut, ketika adanya ketimpangan yang signifikan antara pendapatan tinggi dan rendah pemerintah daerah dihadapkan dengan kesulitan dalam mengelola belanja daerah. Sehingga pemerintah daerah mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan mendasar dan memberikan pelayanan publik yang memadai kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu timbulnya kesenjangan

antar daerah yang menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak terwujud. Pada gambar 2 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat, 2023, data diolah

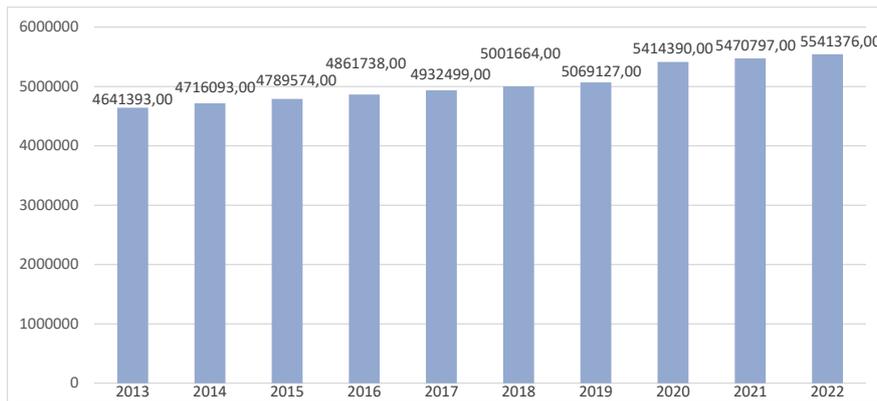
Gambar 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa nilai produk domestik regional bruto di Provinsi Kalimantan Barat, terjadinya kenaikan angka PDRB pada Provinsi Kalimantan Barat selama tujuh tahun yaitu dilihat pada tahun 2013-2019 yang dimana memiliki peran yang besar dalam peningkatan perekonomian suatu wilayah, namun di periode 2020 nilai PDRB dialaminya penurunan yang pada saat itu juga adanya wabah Covid-19 yang melanda sehingga perekonomian menjadi tidak stabil bahkan pendapatan dan pemasukan daerah pun menurun yang sedikit signifikan. Dalam periode 2021-2022 kembali dialaminya kenaikan nilai PDRB yang dipicu karena pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan perekonomian daerah, pemerintah daerah punya peran serius untuk pendorong efektivitas serta percepatan pembaruan perekonomian juga paham tentang komposisi perekonomian di daerah, demografi serta keadaan sosial ekonomi masyarakat pada masa itu. Kebijakan yang dilakukan tentunya untuk pengalokasian dana APBN guna memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi realisasi belanja daerah yaitu jumlah penduduk, penduduk yang mencakup semua individu yang memiliki status sebagai warga negara Indonesia atau warga asing yang berdomisili di wilayah Indonesia dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara serta telah berdomisili paling sedikit satu tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan menyebabkan meningkatnya jumlah serta mutu sarana serta infrastruktur publik sehingga membutuhkan anggaran yang semakin besar (Sutjipto, 2019). Malthus mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah penduduk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, dalam kondisi optimal, pertumbuhan penduduk justru tidak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menghambatnya (Suhandi et al., 2018).

Dengan demikian pemerintah daerah mesti merealisasikan anggaran belanja daerahnya secara efektif agar mengurangi beban pelayanan publik yang mana makin besar kapasitas warga pada sebuah wilayah jadi makin banyak juga permintaan terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan di tiap-tiap daerah. Jika tidak ada penyesuaian yang tepat dalam belanja daerah maka akan menimbulkan defisit dalam penyediaan layanan yang memadai bagi masyarakat. Jumlah penduduk yang relatif tinggi dapat menyebabkan keterbatasan

sumber daya yang tersedia untuk belanja daerah, dimana pemerintah daerah tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup dari pajak dan transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Oleh karena adanya masalah tersebut maka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Pada gambar 3 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat, 2023, data diolah

Gambar 3 Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada Provinsi Kalimantan Barat sepanjang sepuluh periode terakhir terjadi peningkatan tiap periodenya, hal ini terjadi karena jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian, perpindahan penduduk dari dalam dan luar negeri bahkan yang melakukan migrasi maupun emigrasi. Dilihat dari tahun 2013 sampai 2022 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 899.983 jiwa orang.

2. Literature Review

2.1 Teori Wagner

Wagner menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan indikator yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mempengaruhi belanja pemerintah secara positif sehingga aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung mengalami peningkatan (Wagner dalam Pasaribu & Septriani, 2021). Ukuran tersebut diungkapkan melalui pendapatan perkapita penduduk, yang disertai dengan peningkatan pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk masyarakat. Wagner juga mengemukakan bahwa pengeluaran dan aktivitas pemerintah cenderung meningkat seiring waktu yang dikenal sebagai hukum peningkatan peran pemerintah. Inti dari teori ini adalah semakin bertambahnya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, maka relatifnya pengeluaran pemerintah juga akan turut bertambah, terutama sebab pemerintah harus mengatur berbagai hubungan yang muncul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan lain-lain. Wagner percaya bahwa perkembangan ekonomi memengaruhi pengeluaran negara, dan bukan sebaliknya.

Perkembangan ekonomi berpengaruh pada pertumbuhan penduduk, pendapatan dan kecenderungan stabilisasi. Ketiga faktor ini akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah.

Seperti, peningkatan jumlah penduduk akan menimbulkan kebutuhan akan peningkatan fungsi administratif dan keamanan, sementara peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan akan fungsi budaya dan kesejahteraan. Selain itu, kegagalan pasar dalam bentuk monopoli akan mendorong perlunya pemerintah untuk menyediakan barang publik. Dalam konteks hukum Wagner, beberapa alasan peningkatan pengeluaran pemerintah dapat dilihat, termasuk peningkatan dalam fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, peningkatan dalam fungsi kesejahteraan, peningkatan dalam fungsi perbankan serta peningkatan dalam fungsi pembangunan. Teori Wagner mengambil landasan dari suatu teori yang dikenal sebagai *organic theory of state*, dimana pemerintah dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri dan memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dari masyarakat lainnya (Solikin, 2018).

2.2 Teori Malthus

Malthus mengungkapkan bila pertumbuhan populasi akan terus melebihi pertumbuhan bahan makanan, kekhawatirannya terhadap krisis pangan berkaitan dengan kenyataan bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat sementara produksi pangan hanya meningkat secara linear (Malthus dalam Pieris, 2015). Ia percaya bahwa manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidup, namun pertumbuhan produksi makanan berkembang jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan populasi. Tanpa pembatasan pada pertumbuhan populasi, akan terjadi kelangkaan makanan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kemelaratan dan kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi akan melampaui pertumbuhan sumber daya yang tersedia (Ruchmawati, 2017). Oleh karena itu, teori ini menyiratkan bahwa di masa mendatang akan timbul berbagai masalah di masyarakat secara alami, terutama karena tekanan yang terus-menerus dari pertumbuhan penduduk, baik dalam hal aspek ruang dan hasil produksi. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat, permintaan terhadap berbagai layanan dan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan fasilitas umum juga akan meningkat. Pengeluaran pemerintah harus meningkat untuk memenuhi permintaan ini, sehingga diperlukan kontrol atau pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk untuk menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dengan permintaan yang ada agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

2.3 Konsep Belanja Daerah

Belanja daerah yang dikemukakan Afiah (2009) mencakup seluruh pembiayaan yang mengurangi dana kas umum daerah dan merupakan tanggung jawab daerah dalam periode anggaran tertentu, tanpa adanya pengembalian dana tersebut oleh daerah. Terdapat dua kategori pengeluaran daerah, yaitu pengeluaran langsung yang terikat dengan langsung pada pelaksanaan agenda serta pengeluaran tidak langsung merupakan bagian pada tugas utama serta fungsinya, namun tidak secara langsung terhubung pada pelaksanaan programnya.

Belanja daerah menjurus kepada seluruh kewajiban yang dianggap oleh pemerintah daerah yang mengurangi angka kekayaan bersih selama periode tahun anggarannya. (Bawono, 2012). Belanja daerah dipergunakan dalam melakukan berbagai tugas pemerintahan yang jadi tanggung jawab dari entitas provinsi atau kabupaten/kota. Tugas-tugas ini berisikan dua kategori, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup aspek yang sangat penting dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar yang harus diberikan kepada penduduk oleh pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pilihan melibatkan tanggung jawab pemerintahan yang lebih spesifik dan memiliki potensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, berdasarkan pada karakteristik, keunikan, dan potensi daerah tersebut. Contoh-contoh urusan pilihan mencakup sektor-sektor seperti pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, perhutanan serta pertanian (Bawono, 2012).

2.4 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi yakni fenomena peningkatan produksi per kapita dalam jangka panjang (Boediono dalam Arifianto, 2013). Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada proses karena memuat unsur yang bergerak dinamis (Amiri et al., 2015), perkembangan ekonomi daerah terkait PDRB yang mencakup semua barang serta layanan yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi dan berlangsung pada kawasan domestik, tanpa mempertimbangkan apakah faktor produksinya diberikan ataupun dipunyai dari warga wilayah tersebut. PDRB yakni nilai tambah yang diperoleh dari sejumlah aktivitas perekonomian dalam sebuah wilayah (Saberan dalam Herwin, 2022).

Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 4 kata, yakni “produk” terdapat pada total nilai produksi barang dan jasa, “domestik” yang tergambar pada perhitungan nilai produksi dalam wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi, “regional” yang artinya menghitung nilai produksi yang diwujudkan dari masyarakat tidak mempertimbangkan lokasi aspek produksi serta “bruto” mengindikasikan perhitungan nilai produksi sebelum dikurangi biaya penyusutan.

Dengan berlandaskan pada empat definisi tersebut, maka PDRB bisa dimaknai jadi nilai dari semua barang serta layanan yang dihasilkan pada suatu negara untuk jangka waktu satu tahun. Melalui teori ekonomi, disebutkan kuantitas nilai produksi termasuk sekaligus jumlah pendapatan dan pengeluaran. Sehingga Produk Domestik Regional Bruto meningkatkan kesejahteraan kepuasan hidup karena memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan jasa yang beragam (Weckroth et al., 2015). PDRB dari perspektif pendapatan mengacu pada total pendapatan yang terdiri dari bagian nilai tambah seperti sewa tanah, upah, serta keuntungan usahanya. Sementara itu, PDRB pada perspektif pengeluaran mencakup semua pengeluaran yang dilakukan dari pemerintah, rumah tangga, serta lembaga non-profit, tergolong pembentukan nilai. Adapaun upaya dalam mengukur perkembangan perekonomian yakni melalui melihat pertumbuhan PDRB yang di ukur dengan harga konstan karena ini mengabaikan fluktuasi harga dan mencerminkan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Menurut (Arifin, 2009) angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa didapat dengan tiga pendekatan yakni:

1. Pendekatan produksi, yang menunjukkan total nilai tambah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari sejumlah unit produksi dalam suatu kawasan atau provinsi selama periode waktu khusus;
2. Pendekatan pengeluaran, yang mencakup penjumlahan seluruh komponen permintaan terakhir;
3. Pendekatan pendapatan, yang melihat balas jasa yang diterima dari berbagai faktor yang terlibat pada proses produksi untuk sebuah kawasan sepanjang periode tertentu.

2.5 Konsep Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu indikator paling signifikan dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk adalah hasil dari interaksi dinamis antara faktor-faktor yang memicu peningkatan populasi dan faktor-faktor yang mengurangnya. Tingkat pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh laju kelahiran bayi yang baru lahir (penambahan penduduk), namun sekaligus juga dipengaruhi oleh tingkat kematian dalam berbagai kelompok umur. Pada saat yang bersamaan, migrasi juga berperan, dimana imigrasi (kedatangan penduduk baru) akan meningkatkan populasi, sementara emigrasi (kepergian penduduk) akan mengurangnya. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dijelaskan oleh empat komponen utama, yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), imigrasi, dan emigrasi (Wirosuhardjo, 2010).

Kelahiran (*fertilitas*) mengacu pada kapasitas seorang wanita untuk memberikan kelahiran, yang tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Kematian (*mortalitas*) adalah kejadian di mana tanda-

tanda kehidupan menghilang secara permanen dan ini bisa terjadi kapan saja setelah kelahiran. Sementara itu, migrasi melibatkan perpindahan yang cepat dan dapat berdampak secara relatif permanen dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Para ekonom klasik, diantaranya Adam Smith memiliki pandangan bahwa pertumbuhan penduduk sebagai potensi input dengan manfaat untuk meningkatkan hasil produksi rumah tangga. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat, tentu akan memperbanyak lapangan kerja. Namun, ekonom lain seperti Robert Malthus berpendapat bahwa dalam keadaan awal, peningkatan jumlah penduduk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, dalam kondisi optimal, pertumbuhan penduduk tidak akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menghambatnya (Suhandi et al., 2018). Pertumbuhan penduduk mendorong munculnya permasalahan dalam perekonomian, sosiologis dan psikologis yang berkaitan erat dengan kondisi keterbelakangan serta akan menghambat prospek kehidupan yang lebih baik.

3. Methods

Metode kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan data berupa angka dan diolah menggunakan teknik analisis *statistic* yang bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu variabel dari penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2022 selama periode 10 tahun. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa data panel yang menjadi perpaduan antara data *time series* dan data *cross section*, yang dimana terdapat komponen yang sama pada *cross section* dapat dihitung pada waktu yang berbeda. Pada penelitian ini data panel berasal dari realisasi belanja pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dan pengolahan data menggunakan program E-views 10. Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan (Gujarati, 2013):

$$\text{LOG}(\text{Belanja Daerah}) = \alpha + \text{LOG}(\text{PDRB}) + \text{LOG}(\text{Jumlah Penduduk}) + \text{eit}$$

4. Results and Discussion

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya hubungan hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam suatu model. Model yang baik harus bebas dari gejala multikolinearitas. Caranya yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan VIF kurang dari 10. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1 Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	VIF
LOG(PDRB)	7,780291
LOG(JP)	7,780291

Sumber: Data diolah, Eviews 10 (2024)

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) pada variabel PDRB dan jumlah penduduk masing-masing menunjukkan nilai sebesar 7,780291 yang dimana nilai tersebut

kurang dari 10 (<10). Oleh karena itu, bisa disimpulkan bila tidak ditemukan gejala multikolinearitas pada variabel independen dalam penelitian ini.

4.1.2 Uji Regresi Linear

4.1.2.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melakukan pengolahan data dan analisis data, akan tetapi sebelum itu dilakukan terlebih dahulu pemilihan model regresi yang tepat. Ada tiga model yang dapat digunakan untuk menganalisis regresi tersebut diantaranya *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan model tersebut perlu dilakukan uji chow, uji hausmant dan uji lagrange multiplier pada aplikasi Eviews. Adapun hasil dari estimasinya pada tabel 3 berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Model Regresi

Jenis Uji	Prob.	Keputusan
Uji Chow	0,0423	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,1587	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	0,4575	<i>Common Effect Model</i>

Sumber: Data diolah, Eviews 10 (2024)

Berdasarkan tabel 3 probabilitas pada Uji Chow berjumlah 0,0423 dimana p-value tersebut lebih rendah dari pada nilai taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 (p-value < 0,05), berarti pada tahap ini FEM lebih baik dibandingkan dengan CEM. Selanjutnya probabilitas pada Uji Hausman didapatkan sebesar 0,1587 dimana p-value tersebut lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05 (p-value > 0,05), berarti REM lebih baik daripada FEM. Kemudian probailitas pada Uji Lagrange Multiplier didapatkan sebesar 0,4575 dimana p-value tersebut lebih besar dari pada nilai taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 (p-value > 0,05), berarti pada tahap ini CEM lebih baik daripada dengan REM. Artinya model yang akan diaplikasikan guna mengestimasi data pada penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM).

4.1.2.2 Hasil Regresi Linear

Hasil estimasi yang telah diperoleh dari regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	F-Statistic	Prob.	R ²
C	10,75833	8,163214	0,0000			
LOG(PDRB)	-0,088502	-0,364700	0,7159	29,30403	0,000000	0,299620
LOG(JP)	0,904403	2,752060	0,0067			

Sumber: Data diolah, Eviews 10 (2024)

Berdasarkan hasil regresi *Common Effect Model* pada tabel 4 dapat dilihat hasilnya yaitu koefisien untuk variabel PDRB sebesar -0,088502, variabel JP sebesar 0,904403 dan hasil koefisien daripada konstanta yaitu sebesar 10,75833 sehingga didapatkan persamaan regresinya sebagai berikut.

$$\text{LOG}(\text{BD}_{it}) = 10,75833 - 0,008502\text{PDRB} + 0,904403\text{JP}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas dapat diinterpretasikan hubungan serta pengaruhnya terhadap belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

- a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien PDRB sebesar $-0,088502$ menunjukkan arah negatif maknanya terjadi penurunan, artinya jika PDRB mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar $0,088502$ persen dengan asumsi jumlah penduduk konstan.

b). Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien jumlah penduduk sebesar $0,904403$ menunjukkan arah positif maknanya terjadi peningkatan, artinya jika jumlah penduduk mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar $0,904403$ persen dengan asumsi PDRB konstan.

4.1.3 Uji Hipotesis

4.1.3.1 Uji t-Statistik

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada tabel 4 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Variabel PDRB menunjukkan t-statistik sebesar $-0,364700$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,7159$ lebih besar dari taraf signifikan $0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti PDRB mempunyai arah hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Jumlah Penduduk

Variabel jumlah penduduk menunjukkan t-statistik $2,752060$ dengan nilai probabilitas $0,0067$ lebih kecil dari taraf signifikan $0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti jumlah penduduk mempunyai arah hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

4.1.3.2 Uji F-Statistik

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai F-statistik sejumlah $29,30403$ dan nilai probabilitas sejumlah $0,000000$ yang mana lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ jadi variabel PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat.

4.1.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 4 yang dilakukan pengujian *common effect model* pengaruh variabel independen terhadap dependen diperoleh nilai R^2 sebesar $0,299620$ artinya kemampuan variabel PDRB dan jumlah penduduk dalam menjelaskan variabel belanja daerah sebesar $29,96\%$ dan $70,04\%$ sisanya dijelaskan oleh faktor atau variabel lainnya yang berada diluar model dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hubungannya negatif dan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa PDRB yang meningkat maka belanja daerah akan turun, dimana PDRB di Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari tahun 2013-2022. Ketika PDRB suatu daerah mengalami penurunan atau pertumbuhan yang lambat, hal ini dikarenakan kurangnya dana yang ada menghambat berbagai program pembangunan.

Pemerintah daerah cenderung mengalami tekanan keuangan yang lebih besar yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan pemotongan anggaran, yang berakibat pada pengurangan layanan publik, penundaan proyek infrastruktur dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintah. Penurunan PDRB bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan produksi industri kreatif, penurunan investasi, atau perubahan dalam kondisi ekonomi global maupun lokal. Dalam situasi ini, pemerintah daerah sering kali harus menghadapi pendapatan yang lebih rendah dari

PDRB sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai program-program publik.

Tidak terdapat pengaruh terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam PDRB tidak secara kuat mempengaruhi perubahan dalam belanja daerah, kondisi demikian tentunya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pengeluaran pemerintah seperti alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, kebijakan pembangunan regional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada daerah melalui berbagai program dan skema tranfer dana yang nantinya alokasi dana ini dapat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat belanja daerah di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan-kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sektor kesehatan dapat berdampak signifikan pada pola belanja daerah. Meskipun PDRB menurun, belanja daerah akan tetap stabil atau bahkan meningkat jika pemerintah daerah memutuskan untuk tidak mengubah alokasi dana atau melakukan pemangkasan belanja pada sektor tertentu. Hal ini dikarenakan ketika ekonomi suatu daerah berkembang, maka pemerintah Kalimantan Barat cenderung mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik serta pengalokasian dana dari kenaikan PDRB juga tidak cukup untuk anggaran belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, hipotesis yang mengungkapkan bila terdapat pengaruh positif dan signifikan PDRB terhadap belanja daerah ditolak.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan teori Wagner yang mengungkapkan bila pertumbuhan ekonomi dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi belanja pemerintah secara positif sehingga aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat dan meningkatnya pengeluaran pemerintah terkait penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Hasil ini bertentangan dengan temuan penelitian Gorahe et al., (2018), Arioyuda & Sbm (2020), Huda (2020), Ramadhan & Umiyati (2021), Sagala & Malau (2023), Pratami & Dwirandra (2017), Harjiyanti (2015), Fatharani et al., (2022) dan Malau et al., (2023). Namun selaras dengan penelitian Putrisandya & Dewi (2019) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan diakibatkan oleh adanya peningkatan PDRB yang memproksikan pertumbuhan ekonomi namun anggaran belanja daerah dialokasikan guna mendanai belanja pegawai dan biaya langsung lain, sehingga anggaran belanja daerah hanya bersumber dari transfer dana yang dikirimkan oleh pemerintah pusat.

4.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan pada jumlah penduduk maka belanja daerah juga akan turut meningkat, dimana selama 10 tahun terakhir jumlah penduduk di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2022. Hal ini diartikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang kian meningkat akan semakin meningkatkan jumlah anggaran belanja daerah dalam rangka mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik, tentunya akan menandakan adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam mendanai pembangunan berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas umum dan sejumlah fasilitas lainnya. Dalam hal ini, belanja daerah cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat.

Pertumbuhan jumlah penduduk juga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan pendapatan lainnya bagi pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, potensi

pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, dan pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Selain itu, pendapatan dari sektor usaha juga dapat meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa oleh penduduk yang lebih banyak. Dengan pendapat yang meningkat, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya guna dialokasikan ke dalam belanja daerah. Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dapat memicu perkembangan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Dengan populasi yang bertambah, potensi pasar untuk pelaku usaha lokal menjadi lebih besar, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Seiring dengan itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri lokal juga dapat meningkat, yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan belanja daerah untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Oleh karena itu, hipotesis yang mengungkapkan bila terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah penduduk terhadap belanja daerah dapat diterima.

Jumlah penduduk yang tinggi menjadi indikator dalam upaya pembangunan tatanan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan semata, melainkan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pemerintah daerah, sebab dalam perspektif pemerintah hal demikian dianggap sebagai salah satu aset guna meningkatkan kualitas serta keterampilan individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah untuk belanja daerah. Namun peningkatan ini juga harus dikendalikan guna mencegah timbulnya permasalahan lain, misalnya seperti beban pembiayaan dalam terlaksananya pembangunan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori Malthus yang menyebutkan bahwa peningkatan penduduk akan senantiasa lebih cepat daripada peningkatan bahan makanan, kekhawatirannya tentang krisis pangan terkait dengan fakta bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat, sementara produksi pangan hanya tumbuh secara linear. Malthus beragumen bahwa jika pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa kendali, maka akan terjadi kekurangan sumber daya yang akan mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan kematian yang signifikan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mengelola dampak dari pertumbuhan penduduk yang cepat dengan menerapkan kebijakan keluarga berencana yang efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui edukasi pentingnya perencanaan keluarga. Selain itu juga, pemerintah juga perlu meningkatkan produktivitas pangan dengan menemukan solusi inovatif dalam produksi pangan serta mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan potensi ekonomi seperti industri dan jasa yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tekanan pada potensi ekonomi pertanian.

Pemerintah meningkatkan infrastruktur dasar, guna mendukung distribusi pangan yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk memberdayakan masyarakat sehingga dapat berkontribusi lebih efektif dalam perekonomian. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan peningkatan produksi pangan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, sehingga krisis pangan yang dikhawatirkan oleh Malthus dapat dihindari. Hal ini akan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi kekuatan pendorong yang positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Hermanto (2017), Mooy & Rahayu (2019), Ramadhan & Umiyati (2021), Januarti et al., (2022), Handayani et al., (2022), Wahyuningtyas et al., (2022), Safaah et al., (2022) di Kalimantan Barat, Fatharani et al., (2022) dan Olivia (2023). Namun bertentangan dengan penelitian Setiyawan et al., (2019), Fajriati et al., (2021),

Dahliah (2022), Gorahe et al., (2018) dan Malau et al., (2023) yang mengungkapkannya bila jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap belanja daerah.

5. Conclusions and Recommendations

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan ketika ekonomi suatu daerah berkembang, maka pemerintah cenderung mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik serta pengalokasian dana dari kenaikan PDRB juga tidak cukup untuk anggaran belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan menurut pandangan pemerintah besarnya jumlah penduduk merupakan salah satu aset guna mendorong peningkatan mutu serta keahlian atau keterampilannya sehingga dapat menciptakan produktivitas tinggi dan mendorong peningkatan pendapatan belanja daerah.

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah harus mempertimbangkan strategi pengelolaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efisiensi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan dana dari kenaikan PDRB untuk meningkatkan belanja daerah.
2. Pemerintah diharapkan harus meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan penduduk. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk, serta meningkatkan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Acknowledgments

Dalam penulisan penelitian dan artikel ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini.

References

- Afiah, N. N. (2009). *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 1). Kencana.
- Amiri, M. U., Kalangi, J. B., & Walewangko, N. (2015). Pengaruh Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa-Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 1–15.
- Arifianto, W. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Arifin, Z. (2009). Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi di

- Daerah. *Bappeda.Jambiprov.Go.Id*, 1–3.
- Arioyuda, F., & Sbm, N. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dana Alokasi Umum, Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 141. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Salemba Empat.
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan* (Cetakan 1). Lindan Bestari.
- BPS. (2023a). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022*. Badan Pusat Statistik Pontianak.
- BPS. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022*. Badan Pusat Statistik Pontianak.
- BPS. (2023c). *Realisasi Belanja Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022*. Badan Pusat Statistik Pontianak.
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187.
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Wacana Publik*, 15(02), 75–85. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.71>
- Fatharani, M., Fadliyanti, L., & Agustiani, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–17.
- Gorahe, I. A. M., Masinambow, V., & Engka, D. (2018). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 1–12.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi 5 Buku 1). Salemba Empat.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sorot*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Harjiyanti, N. (2015). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah D.I. Yogyakarta. *Ekonomi*, 1–9.
- Hermanto, S. B. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22), 1–22.
- Herwin (2022). Pengaruh Jumlah Wisatawan , Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 2008-2019. 2(3), 573–580.
- Huda, S. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pajak Daerah di Kabupaten Pamekasan. *Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 3(2), 77–87.

- Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cafeteria*, 3(1), 1–13.
- Malau, Y. N., Ginting, A. B., Paskah, A., & Br, R. (2023). Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , Indeks Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. 7(2), 1397–1402. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1087>
- M. Sagala. Y. Malau. (2023). Pengaruh PDRB, Dana Bagi Hasil Dan Investasi Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12(1), 12–26.
- Mooy, P. C. A., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Yuliastuti Rahayu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Olivia, A. (2023). Pengaruh DBH , SILPA , Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),. 1(4).
- Pasaribu, E., & Septriani, S. (2021). Pengujian Wagner’S Law Versus Keynesian Hypothesis: Pendekatan Regional Indonesia. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(2), 181–193.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pieris, K. W. D. (2015). Ketahanan dan krisis pangan dalam perspektif Malthus, depedensi dan gender (Women in Development). *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 1-13.
- Pratami, A. A. P. N. I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, dan PDRB Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1141–1170.
- Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2019). ISSN : 2303-017 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , PDRB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(11), 4717–4744.
- Ramadhan, P. R., & Umiyati, E. (2021). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bungo. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 135–146.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Deepublish.
- Ruchmawati, S., & Tuasela, A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Harga Tanah di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 1(1), 4-4.
- Safaah, N., Syani, Z., Aprilianto, F., & Anwar, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 60-74
- Setiyawan, Y. P., Zuhroh, I., & Abdullah, M. F. (2019). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(1), 2.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di

- Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- Sudaryono, D. (2019). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method* (Edisi 2, Cetakan 3) Depok. Rajawali Pers
- Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2), 77–82. <https://doi.org/10.36982/jig.v9i2.543>
- Suharlina, H. (2018). Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP 2018 FEB Universitas Tanjungpura.*, 7, 101110.
- Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia., 3(2), 104-117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Weckroth, M., Kemppainen, T., & Sørensen, J. F. L. (2015). Predicting the gross domestic product (GDP) of 289 NUTS regions in Europe with subjective indicators for human and social capital. *Regional Studies, Regional Science*, 2(1), 312–331. <https://doi.org/10.1080/21681376.2015.1037863>
- Wahyuningtyas C. C. W., Tari Widati, T. W., Dalili Batrisyia, D. B., & Saiful Anwar, S. A. (2022). Determinan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)*, 2(02), 64–78. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v2i02.78>
- Wirosuhardjo, K. (2010). *Dasar-Dasar Demografi* (O. B. Adioetomo, Sri Moertiningsi Samosir Cetakan 2). LPFEUI: Salemba Empat